

Pengaruh Akses Keuangan, Modal Keuangan, Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng

Komang Sri Oktayani¹, Luh Gede Kusuma Dewi² 

Email: sri.oktayani@undiksha.ac.id

Email: dewi.kusuma.dewi@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belaki oleh fenomena kendala akses keuangan, pemanfaatan modal usaha, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk UMKM. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh akses keuangan, modal usaha, dan kebijakan pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Buleleng dengan jumlah 87 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan kuisioner dengan skala likert. Data diolah dengan SPSS berupa uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik. Selanjutnya dilakukan uji regresi linier berganda, uji t, uji f untuk mengevaluasi kelayakan model, dan koefisien determinasi digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Akses keuangan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng; (2) Modal keuangan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng; (3) Kebijakan pemerintah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng.

Keywords: akses keuangan; modal keuangan; kebijakan pemerintah.

Abstract

This research is based on the phenomenon of obstacles to financial access, use of business capital, and policies made by the government for MSMEs. The aim of this research is to partially analyze the influence of financial access, business capital and government policy on the growth of MSMEs in Buleleng District. This research uses a quantitative research approach. The sample used in this research was MSMEs in the trade sector in Buleleng District with a total of 87 respondents. The type of data used is primary data. The data collection method used was a questionnaire with a Likert scale. The data was processed using SPSS in the form of descriptive statistical tests, validity tests, reliability tests and classical assumption tests. Next, multiple linear regression tests, t tests, f tests were carried out to evaluate the feasibility of the model, and the coefficient of determination was used to test the hypothesis. The results of this research are: (1) Partial financial access has a positive and significant influence on the growth of MSMEs in Buleleng District; (2) Financial capital partially has a positive and significant influence on the growth of MSMEs in Buleleng District; (3) Government policy partially has a positive and significant influence on the growth of MSMEs in Buleleng District.

Keywords: financial access; financial capital; government policy.

Pendahuluan

Data yang diperoleh Kementerian Koperasi dan UMKM menyatakan saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan yang menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4%. Namun meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Perkembangan UMKM yang cukup pesat menampakan adanya potensi yang besar atas kekuatan domestik. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Tahun 2023, jumlah UMKM di Provinsi Bali 429.382.UMKM yang tersebar secara tidak merata di seluruh Kabupaten dan Kota di pulau Bali. Buleleng memiliki jumlah UMKM terbesar, sementara Gianyar memiliki jumlah transformasi terbesar dalam sektor ini.

Tabel 1. Data Keragaman UMKM Bali Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Sektor	Klasifikasi Jumlah	Transformasi Jumlah
1.	Badung	Perdagangan	10.068	21.699
2.	Bangli	Perdagangan	23.196	44.251
3.	Buleleng	Perdagangan	48.043	66.368
4.	Denpasar	Perdagangan	10.616	29.749
5.	Gianyar	Perdagangan	30.468	75.666
6.	Jembrana	Perdagangan	44.973	57.183
7.	Karangasem	Perdagangan	31.760	50.717
8.	Klungkung	Perdagangan	23.610	35.792
9.	Tabanan	Perdagangan	26.144	47.957
	Jumlah		248.875	429.382

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten dengan jumlah transformasi tertinggi. Dilansir melalui updatebali.com Buleleng terkenal sebagai daerah yang produktif dalam bidang ekonomi kreatif berkat sumber dan alam dan kekayaan budayanya. Hal tersebut menjadikan pertumbuhan UMKM di Kabupaten begitu signifikan dan menjadikannya sebagai nomor satu dalam transformasi UMKM di provinsi Bali.

Sekretaris Daerah kabupaten Buleleng menyatakan bahwa [Buleleng](https://updatebali.com) termasuk dalam kategori cukup stabil dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 berkat kontribusi dari UMKM. Tidak hanya itu, sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng juga memiliki kontribusi sekitar 37 hingga 40 persen dalam sektor pariwisata. Meskipun pariwisata di Buleleng tidak sebesar di Bali Selatan, namun sektor ekonomi kreatif tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga perekonomian daerah. Di sisi lain, Analisis Kebijakan Ahli Madya dari Kememparekraf RI, Elizabeth Tioria Gurning, menjelaskan bahwa terdapat 17 sub-sektor Ekonomi Kreatif yang dikenal di seluruh Indonesia. Dalam kunjungannya ke Buleleng, timnya telah berinteraksi dengan para pelaku kuliner, seni pertunjukan, *fashion*, musik, dan *kria* (<https://updatebali.com/>). Hasil dari kunjungan tersebut menunjukkan bahwa semua sub-sektor tersebut memiliki potensi yang kuat, dan tim harus menemukan sub-sektor mana yang memiliki tingkat kreativitas lebih tinggi.

Kabupaten Buleleng telah mengalami kesulitan dalam mengakses modal sebanyak 45,71%. Namun, setelah Covid-19 kesulitan dalam mengakses modal pada UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan menjadi 71,4%. Maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan kesulitan modal UMKM di Kabupaten Buleleng meningkat sebesar 25,7%. Data kesulitan akses modal tersebut disampaikan pada situs resmi

<https://balitbang.bulelengkab.go.id>. Adapun kerugian yang didapat oleh masyarakat pelaku UMKM dari adanya virus ini yaitu penurunan omzet yang sangat drastis sehingga membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam mengatur keuangan karena kebutuhan yang banyak serta pendapatan yang mulai menurun (Arta & Dewi, 2021).

Kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kesulitan dalam sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan operasional bisnis mereka. Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk modal yang dapat membantu UMKM, tetapi jika hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang mendapatkannya, ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses ke modal. Akses keuangan mengacu pada kemampuan individu, rumah tangga, atau bisnis untuk mengakses berbagai layanan keuangan dan produk. UMKM sering kali memerlukan sumber dana tambahan untuk memperluas operasi, membeli peralatan, mengembangkan produk, atau memasuki pasar baru. Namun terdapat kendala dimana UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses produk jasa keuangan karena tingginya persyaratan dari bank sehingga terkadang sulit dipenuhi, instusi keuangan yang terlalu selektif dalam memilih nasabah, dan pandangan terhadap nasabah golongan rendah yang dianggap tidak menguntungkan (<https://blog.mekar.id/>). Akses keuangan yang baik memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pinjaman atau modal ventura yang diperlukan untuk pertumbuhan UMKM. Akses keuangan yang memadai memungkinkan UMKM untuk membeli inventaris dan bahan baku dalam jumlah yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan efisien. Hal ini dapat meningkatkan produksi dan penawaran produk atau layanan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aqida & Fitria, 2019) yang menyatakan bahwa akses keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Semarang.

Kesulitan permodalan yang terus meningkat memiliki kaitan erat dengan konsep modal keuangan. Modal Keuangan mengacu pada sumber daya keuangan yang digunakan dalam bisnis atau investasi. Kesulitan permodalan pada UMKM menciptakan tantangan dalam mengakses dan memanfaatkan *Modal Keuangan* dengan efektif. Salah satu cara utama untuk mengatasi kesulitan permodalan adalah dengan mengakses pinjaman atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Modal Keuangan dalam bentuk pinjaman memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal tambahan untuk pertumbuhan, pembelian inventaris, atau pengembangan produk. Modal Keuangan adalah salah satu bentuk modal yang digunakan dalam dunia keuangan dan bisnis. Modal ini merujuk pada sumber daya keuangan yang tersedia untuk digunakan dalam investasi, bisnis, atau kegiatan ekonomi lainnya. Modal Keuangan melibatkan uang tunai, aset keuangan, dan sumber daya keuangan lainnya yang digunakan untuk tujuan ekonomi. Pengaruh Modal Keuangan terhadap pertumbuhan UMKM telah dinyatakan dalam penelitian (Marija et al., 2021). UMKM memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan, investor, dan program dukungan UMKM sangat penting untuk membantu UMKM dalam memperoleh Modal Keuangan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan mereka.

Penyaluran BLT kepada pelaku UMKM adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk dapat merangsang pertumbuhan UMKM. Kebijakan lainnya ialah berupa infrastruktur berupa Pusat Layanan Usaha Terpadu. Menurut Riawan (2009: 197) pemerintah memiliki kewenangan dalam memberikan pengarahan terhadap kegiatan di masyarakat, oleh karena itu pemerintah juga memiliki hak untuk membuat regulasi-regulasi atau peraturan untuk kepentingan masyarakat (Purwaningsih & Haryono, 2019). (Hadiyati & Mulyono, 2017) mengatakan, bahwa UMKM juga perlu untuk memperoleh dukungan dalam memperkuat teknologi, pemasaran, dan keuangan. Dukungan ini sangat diperlukan untuk mempertahankan eksistensi UMKM karena sebagian besar UMKM tersebut tidak memiliki

lokasi permanen dan tidak ada status hukum, sehingga UMKM rentan terhadap berbagai kesulitan. UMKM mengalami kesulitan sehingga ini dapat menghambat potensi pertumbuhan dan kinerja usaha. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan mikro yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Lingkungan mikro adalah para pelaku yang terlibat langsung dengan UMKM yaitu seperti pemasok, pelanggan agen penjual, lembaga pemerintah dan pesaing. (Hadiyati & Mulyono, 2017) juga menyatakan bahwa usaha kecil dan mikro akan tumbuh bilamana lingkungan aturan/kebijakan mendukung, lingkungan makro ekonomi dikelola dengan baik, stabil dan dapat diprediksi. Kebijakan pemerintah diketahui dapat mempengaruhi pertumbuhan UMKM dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pramestiningrum & Iramani, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh akses keuangan, Modal Keuangan, dan kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM khususnya di kecamatan Buleleng. Penelitian mengenai hubungan antara akses keuangan dan pertumbuhan UMKM telah menemukan beberapa hasil yang berbeda. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Aqida & Fitria, 2019) menemukan adanya hasil yang positif signifikan pada hubungan akses keuangan dan pertumbuhan UMKM. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sibanda & Shava (2017) menunjukkan pada hubungan akses keuangan dan pertumbuhan UMKM dengan hasil negatif signifikan. Penelitian mengenai hubungan antara akses keuangan dan pertumbuhan UMKM telah menemukan beberapa hasil yang berbeda. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anjelia, 2023) menemukan adanya hasil yang positif signifikan pada hubungan modal keuangan dan pertumbuhan UMKM. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulatuzulfa, (2022) menunjukkan pada hubungan modal keuangan dan pertumbuhan UMKM dengan hasil negatif signifikan. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwaningsih & Haryono, (2019) menemukan adanya hasil yang kebijakan pemerintah tudam berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih dan Kusuma (2018) menunjukkan Keuangan UMKM dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja UKM memilih pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut: (1) Seberapa besar pengaruh akses keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng?; (2) Seberapa besar pengaruh modal keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng?; dan (3) Seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng?

Pengaruh Akses Keuangan terhadap Pertumbuhan UMKM di kecamatan Buleleng

Owusu et al.,(2017) menyatakan bahwa sumber daya keuangan adalah aset organisasi yang digunakan untuk mengimbangi kewajiban dan pada saat yang sama memperoleh aset lain yang harus dimiliki perusahaan secara melimpah untuk mencapai target pertumbuhan. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2021) menyatakan bahwa akses keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha, yang berarti akses keuangan merupakan bagian penting dalam permasalahan UMKM, berbeda dengan perusahaan besar yang mudah mendapat pendanaan modal, untuk UMKM kendala utama adalah minimnya modal melalui akses keuangan. Sehingga hasil ini mendukung bahwa akses keuangan dapat menunjang kinerja usaha. Hal ini dapat disimpulkan keterkaitan akses keuangan terhadap pertumbuhan UMKM memiliki hubungan yang positif. Sehingga, hipotesis pertama yang diajukan ialah:

H1 : Terdapat Hubungan yang positif dan signifikan antara akses keuangan dengan pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng.

Pengaruh Modal Keuangan Terhadap Pertumbuhan UMKM

Sumber daya (keuangan dan nonkeuangan) adalah salah satu faktor internal sebagai kekuatan atau kelemahan perusahaan tertentu, terdiri dari aset berwujud dan tidak berwujud (Eniola & Ektebang, 2014). UKM telah mendapatkan fasilitas dan akses memperoleh bantuan dana untuk mengembangkan usahanya. Umumnya, pengusaha mulai usahanya dengan modal sendiri. Menurut Penelitian (Aini, 2022) menyatakan Modal keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UKM. Hal ini berarti modal keuangan yang telah diterapkan pelaku UKM di Kabupaten Demak dapat berpengaruh terhadap Kinerja, karena pelaku UKM dapat menentukan modal baik modal sendiri maupun modal pinjaman dalam mengelola usaha, serta memiliki kemampuan dalam mengelola keuntungan atau laba yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan Kinerja UKM. Dalam hal ini adanya pengaruh Modal keuangan terhadap Kinerja UMKM. Sehingga, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara modal keuangan terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan UMKM

Pemerintah telah mengambil peran yang strategis dalam memberdayakan UKM melalui UU No. 20 Tahun 2008 (2008) tentang UMKM. Peran pentingnya program pemberdayaan UMKM yang berkaitan dengan faktor nonekonomi dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Program pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah akan meningkatkan daya saing UKM dan juga mempengaruhi kinerja bisnis (Hadiyati & Mulyono, 2017). Menurut penelitian Vina Natasya, Pancawati Hardiningsih (2021) menyatakan bahwa bantuan sosial berpengaruh terhadap pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yaitu salah satunya pemberian bantuan sosial dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Sehingga, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H3 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kuantitatif didasarkan pada metode ilmiah yang melibatkan pengumpulan data melalui instrumen pengukuran yang terstandar, seperti kuesioner, skala, atau pengukuran objektif lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menarik kesimpulan dan membuat generalisasi tentang populasi yang lebih luas. Dalam penelitian ini data-data kuantitatif yang dimaksud adalah jumlah responden yang menjawab pertanyaan kuesioner.

Menurut (Sugiyono, 2017) mengatakan jika populasi merupakan daerah generalisasi yang terdapat atas objek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk memahaminya dan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang memiliki IUMK di Kecamatan Buleleng yakni sebanyak 634 UMKM. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Besaran sampel penelitian dengan rumus Slovin ditentukan lewat nilai tingkat kesalahan. Dimana semakin besar tingkat kesalahan yang digunakan, maka semakin kecil jumlah sampel yang diambil. Berikut merupakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

n = Besarnya Sampel

N = Jumlah Populasi

e^2 = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir

$$n = \frac{364}{1+634(0,10)^2}$$

$$n = \frac{31.700}{367}$$

$$n = 38 \frac{138}{387}$$

n = 86,37 dibulatkan menjadi 87

Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikansi 10% diperoleh sampel 87 UMKM. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria – kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penulis sebagai berikut :

- 1) UMKM pada sektor perdagangan yang sudah terdaftar IUMK dan terletak di Kecamatan Buleleng karena Kecamatan Buleleng merupakan subjek dalam penelitian ini.
- 2) Usaha yang berjalan ≥ 5 Tahun untuk mengetahui perkembangan usaha. Jumlah sampel sebanyak 87 UMKM sudah dapat mewakili populasi sehingga hasil penelitian akan dapat digeneralisasi karena perhitungan tersebut sudah berdasarkan rumus penentuan sampel yang diterima secara umum dalam berbagai penelitian ilmiah. Pemilihan sampel berdasarkan kedua kriteria *purposive sampling* diatas dapat memenuhi klasifikasi sampel.

Proses dalam mengumpulkan data pada penelitian berlangsung untuk mengumpulkan data yang jelas dan ringkas. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif yang merupakan data yang berbentuk angka. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sebuah pernyataan ataupun pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan sebuah jawaban (Sugiyono, 2017). Penyebaran kuisisioner dilakukan dengan memberikan kuisisioner yang berisi daftar pernyataan yang telah disusun kepada responden. Adapun, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan bantuan program *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pertumbuhan UMKM (Y)	Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan usaha-usaha tersebut. Pertumbuhan ini dapat tercermin dalam beberapa indikator, termasuk namun tidak terbatas pada pendapatan, skala produksi, jumlah karyawan, pangsa pasar, dan pengaruh ekonomi.	Pertumbuhan usaha Pertumbuhan pendapatan usaha Pertumbuhan modal Penambahan tenaga kerja setiap tahun Pertumbuhan pasar dan pemasaran (Hidayatulloh, 2020)
Akses Keuangan	Akses keuangan adalah	Kemudahan akses

(X1)	kemampuan individu, rumah tangga, atau entitas bisnis untuk memperoleh, menggunakan, dan memiliki layanan keuangan secara efektif. Ini mencakup sejumlah aktivitas dan produk keuangan, seperti membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, menggunakan kartu kredit, serta partisipasi dalam produk dan layanan keuangan lainnya.	keuangan Tempat layanan keuangan mudah dijangkau Mengetahui ketersediaan jasa dan produk keuangan. Waktu dan keteraturan menggunakan layanan keuangan. Kecepatan dan ketepatan saat memberikan pelayanan. Lembaga keuangan (Bank) memberikan pelayanan yang sesuai. Kredit yang diberikan lembaga keuangan memberikan tambahan modal UMKM Pembiayaan dan kredit yang diberikan cukup. (Yanti, 2019)
Modal Keuangan(X2)	Modal keuangan adalah sumber daya finansial yang digunakan oleh individu, perusahaan, atau lembaga untuk melakukan kegiatan ekonomi atau investasi. Modal ini dapat berasal dari berbagai sumber dan memiliki peran yang penting dalam mendukung operasional, pertumbuhan, dan pengembangan suatu entitas.	Modal Sendiri Modal Pinjaman Akumulasi keuntungan Penggunaan layanan jasa keuangan. (Aini, 2022).
Kebijakan Pemerintah (X3)	Kebijakan pemerintah adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan. Kebijakan ini dirancang untuk membimbing perilaku, mengatur aktivitas, dan mengarahkan perkembangan dalam masyarakat.	Pembiayaan Bantuan Sosial (Nirmayasari, 2021).

Uji Validitas

Hasil uji validitas diatas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan hasil pengujian di atas keempat variabel dari variabel Akses Keuangan (X1), Modal Keuangan (X2), Kebijakan Pemerintah (X3), dan Pertumbuhan UMKM (Y) pada tabel di atas terlihat bahwa semua item dari masing-masing *variable* yang di uji validitas menunjukkan bahwa semua item dengan nilai valid yakni koefisien korelasi (r -hitung) > 0,2108. Hal ini menunjukkan bahwa semua item dari masing-masing variabel tersebut tersebut tepat digunakan sebagai alat ukur.

Uji Realibilitas

Penulis melakukan uji realibilitas dengan cara pengukuran sekali saja dengan bantuan SPSS dengan mengukur korelasi antar jawaban pernyataan. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,70. Atas hasil tersebut, dapat dilihat jika keseluruhan nilai *Cronbach alpha* diatas angka 0,70. Maka dapat disimpulkan jika kuisisioner akses keuangan (X1), modal keuangan (X2), kebijakan pemerintah (X3), dan pertumbuhan UMKM (Y) memenuhi tingkat reliabilitas sehingga kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Uji Normalitas

Uji normalitas dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dihasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data *residual* dalam model regresi ini yang dimana distribusi dari populasi adalah normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan nilai $0,200 \geq 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada semua unit analisis berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada variabel bebas akses keuangan (X1), modal keuangan (X2), kebijakan pemerintah (X3) menunjukkan bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis korelasi *Rank Spearman*. Dari tabel diatas menunjukkan hasil nilai signifikansi atau *Sig. (2-tailed)* variabel Akses Keuangan (X1) sebesar 0,843, variabel Modal Keuangan (X2) sebesar 0,952, dan variabel Kebijakan Pemerintah (X3) sebesar 0,900. Karena ketiga variabel independen (X) lebih besar dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas. Artinya model regresi yang dipakai untuk penelitian ini layak untuk dilakukan.

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		<i>Unstandardized</i>	<i>Standardized</i>		t	Sig.
		<i>Coefficients</i>	Beta			
	B	<i>Std. Error</i>				
1.	(Constant)	2.244	4.112		.546	.586
	AksesKeuangan	.236	.118	.102	2.001	.049
	ModalKeuangan	1.064	.101	.680	10.516	.000
	KebijakanPemerintah	.531	.131	.263	4.045	.000

Mengacu pada nilai *Unstandardized Coefficients Beta*, persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 2,244 + 0,236X1 + 1,064X2 + 0,531X3 + e$$

Y = Pertumbuhan UMKM

X1 = Akses Keuangan

X2 = Modal Keuangan

X3 = Kebijakan Pemerintah

e = *Standard Error*

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat diinterpretasikan pola pengaruh variabel Akses Keuangan (X1), Modal Keuangan (X2), Kebijakan Pemerintah (X3) Terhadap Pertumbuhan UMKM:

1. Konstanta sebesar 2.244, menunjukkan tanpa adanya variabel akses keuangan (X1), modal keuangan (X2), dan kebijakan pemerintah (X3) atau ketiga variabel tersebut sama dengan 0, maka pertumbuhan UMKM sebesar 2,244.
2. Nilai Koefisien variabel akses keuangan (X1) sebesar 0,236 bertanda positif berarti bahwa variabel akses keuangan (X1) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM (Y). Sehingga dari hasil koefisien regresi variabel akses keuangan (X1) sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya pertumbuhan UMKM (Y) juga nantinya akan meningkat sebesar 0,236.
3. Nilai koefisien variabel modal keuangan (X2) sebesar 1,064 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara variabel modal keuangan (X2) terhadap variabel pertumbuhan UMKM (Y). Jika setiap variabel modal keuangan mengalami peningkatan, maka pertumbuhan UMKM juga akan meningkat sebesar 1,064 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan.
4. Nilai koefisien kebijakan pemerintah (X3) sebesar 0,531 bertanda positif berarti bahwa variabel kebijakan pemerintah (X3) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM (Y). Sehingga dari hasil koefisien regresi variabel pada penelitian ini, jika terjadi peningkatan pada variabel kebijakan pemerintah (X3) sebesar 0,531 satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya pertumbuhan UMKM (Y) juga nantinya akan meningkat sebesar 0,531.

Tabel 4. Koefisien Regresi dan Uji t

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1. (Constant)	2.244	4.112			0.546	0.586
AksesKeuangan	0.236	0.118	0.102		2.001	0.049
ModalKeuangan	1.064	0.101	0.680		10.516	.000
KebijakanPemerintah	0.531	0.131	0.263		4.045	.000

Sumber: Hasil Pengujian *Output* SPSS

1. Pengaruh Akses Keuangan Terhadap Pertumbuhan UMKM

Hasil uji t untuk pengujian hipotesis variabel Akses Keuangan (X1) diperoleh nilai probabilitas signifikansi t sebesar 0,049 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan B bertanda positif sebesar 0,236 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Akses Keuangan (X1) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM (Y).

2. Pengaruh Modal Keuangan Terhadap Pertumbuhan UMKM

Hasil uji t untuk pengujian hipotesis variabel Modal Keuangan (X2) diperoleh nilai probabilitas signifikansi t sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan B bertanda positif sebesar 1,064 yang berarti H0 diterima dan H2 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Modal Keuangan (X2) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM (Y).

3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan UMKM

Hasil uji t untuk pengujian hipotesis variabel Kebijakan Pemerintah (X3) diperoleh nilai probabilitas signifikansi t sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan B bertanda positif sebesar 0,531 yang berarti H0 ditolak dan H3 diterima. Maka dapat

disimpulkan bahwa variabel Kebijakan Pemerintah (X3) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM (Y).

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R ²	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.887 ^a	0	0.780	2.09776
		.787		

Sumber: Hasil Pengujian *Output* SPSS

Uji koefisien determinan menunjukkan hasil nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah 0,780 atau 78% dari keseluruhan kuisioner. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 78% variasi pertumbuhan UMKM dapat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu Akses Keuangan, Modal Keuangan, Kebijakan Pemerintah sedangkan sisanya sebesar 0,220 atau 22 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Akses Keuangan terhadap Pertumbuhan UMKM Kecamatan Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian akses keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Akses keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di lingkungan seperti Kecamatan Buleleng. Jasa keuangan., layanan keuangan, dan produk yang disediakan oleh lembaga keuangan merupakan akses keuangan yang dapat diperoleh oleh UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Jasa dan layanan ini memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Penggunaan jasa keuangan dan produk keuangan dari lembaga keuangan merupakan salah satu implementasi dari inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga (Bank Indonesia, 2014). Jasa keuangan seperti pinjaman usaha, kredit modal kerja, dan garansi dapat membantu UMKM untuk mengatasi hambatan keuangan dan memperluas operasi mereka. Dengan adanya jasa keuangan dan layanan keuangan yang memadai, UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam ekonomi yang semakin terhubung secara global.

Di Kecamatan Buleleng, keberadaan program KUR dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan UMKM. Melalui KUR, pelaku UMKM dapat memperoleh dana pinjaman dengan bunga yang relatif rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan produk pinjaman lainnya. Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat tidak melibatkan banyak pihak, karena Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit komersial yang menggunakan dana perbankan dengan jaminan ditanggung pemerintah melalui perusahaan penjaminan (Aristanto, 2019). Hal ini memungkinkan UMKM untuk mengakses modal yang diperlukan untuk meningkatkan skala operasi, meningkatkan produksi, atau bahkan memperluas bisnis mereka ke pasar yang lebih luas. Selain itu, edukasi yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga terkait tentang akses keuangan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder*, dimana teori ini menyatakan bahwasannya posisi dari *stakeholder* dianggap dapat memberikan kekuatan dalam mengoptimalkan kinerja suatu usaha atau organisasi. Pada UMKM *stakeholder* dinilai bagian dari suatu usaha. Pada penelitian ini Lembaga Keuangan merupakan *stakeholder* bagi UMKM yang mampu memberikan suatu *power* untuk UMKM melalui jasa dan pelayanan

keuangan serta produk keuangan yang diberikan kepada UMKM sehingga UMKM mampu mengelola usaha secara optimal agar tercapai kinerja yang maksimal dengan pemanfaatan aset yang dimilikinya. Jasa dan pelayanan keuangan serta produk keuangan ini dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, UMKM mampu memperoleh akses keuangan dengan mudah melalui jasa keuangan, pelayanan keuangan, serta produk keuangan sehingga kinerjanya dapat dioptimalkan dan bertumbuh dengan baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahbana & Novita, 2018) memperoleh hasil yang sejalan dengan penelitian ini dimana akses keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Semarang. (Syahbana & Novita, 2018) dalam penelitiannya juga memperoleh hasil yang sejenis dan menyatakan bahwa akses keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM.

Pengaruh Modal Keuangan terhadap Pertumbuhan UMKM Kecamatan Buleleng

Berdasarkan penelitian ini, hubungan antara modal keuangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah elemen krusial dalam ekonomi. Hasil penelitian dapat menunjukkan hubungan positif antara modal keuangan dan pertumbuhan UMKM dalam kasus tertentu, namun secara keseluruhan, hubungan ini cenderung bervariasi bergantung pada konteks dan faktor-faktor lain yang terlibat. Modal keuangan menjadi pondasi bagi pertumbuhan UMKM. Dengan modal yang cukup, UMKM dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan produk, ekspansi pasar, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Semua ini dapat memicu pertumbuhan bisnis yang substansial.

Modal keuangan memungkinkan UMKM untuk menunjukkan keberhasilan dan potensi pertumbuhannya kepada dunia luar. Dengan mendapatkan akses terhadap modal, UMKM bisa mengekspresikan keyakinan dalam rencana bisnis mereka dan kemampuan untuk mengelola risiko, yang merupakan sinyal positif bagi investor, pelanggan, dan pihak lainnya. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa UMKM tersebut menghadapi masalah manajemen keuangan atau strategi bisnis yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Penggunaan modal usaha dengan bijak dan akumulasi keuntungannya dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan berkelanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan menggunakan modal yang diperoleh secara efisien, UMKM dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan memperluas jangkauan pasar. Melalui akumulasi keuntungan, UMKM dapat memperkuat modal mereka sendiri, sehingga menjadi lebih mandiri secara finansial dan kurang tergantung pada pinjaman atau investasi eksternal. Dengan demikian, UMKM dapat menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan dimana keuntungan yang dihasilkan reinvestasi untuk mengembangkan bisnis mereka lebih lanjut dan meningkatkan aset serta produktivitas dari UMKM itu sendiri.

Penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang memiliki asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Freeman dkk., 2004). Dalam penelitian ini modal usaha merupakan nilai secara eksplisit yang menjadi pendorong UMKM dalam kegiatan usahanya sehingga dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Selain itu, bagi UMKM pelanggan/*customer* menjadi salah satu *stake* yang menjadi pertimbangan utama UMKM dalam mengelola usaha secara optimal agar tercapai kinerja yang maksimal dengan pemanfaatan aset yang dimiliki termasuk *intellectual capital* yang dalam hal ini adalah modal usaha yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marija et al., (2021) yang menyatakan bahwa modal keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) di kota Malang. Temuan dari penelitian ini mendukung

temuan yang dilaporkan oleh Marija et al., (2021), yaitu adanya hubungan positif antara modal keuangan dan pertumbuhan UMKM.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pertumbuhan UMKM Kecamatan Buleleng

Pengaruh positif kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diamati dalam konteks kecamatan Buleleng, di mana salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian bantuan tunai langsung kepada para pelaku UMKM. Bantuan tunai langsung ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dalam beberapa cara. Bantuan tunai langsung dari pemerintah dapat memberikan sumber daya tambahan kepada pelaku UMKM di kecamatan Buleleng. Dengan adanya akses tambahan terhadap modal, UMKM memiliki kesempatan untuk melakukan investasi dalam pengembangan usaha mereka, seperti meningkatkan produksi, memperluas jangkauan pasar, atau meningkatkan kualitas produk dan layanan

Bantuan tunai langsung dapat meningkatkan daya beli masyarakat lokal di kecamatan Buleleng. Ketika UMKM menerima bantuan, mereka cenderung mengalokasikan sebagian dari dana tersebut untuk pembelian barang dan jasa lokal. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, memberikan dorongan tambahan bagi pertumbuhan UMKM dan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, bantuan tunai langsung juga dapat memberikan dampak positif terhadap kepercayaan dan motivasi pelaku UMKM di kecamatan Buleleng. Penerimaan bantuan dari pemerintah dapat memberikan rasa diakui dan didukung oleh pemerintah, yang dapat meningkatkan semangat dan kepercayaan diri pelaku UMKM untuk terus berkembang dan mengembangkan usaha mereka. Lebih lanjut, kebijakan ini dapat berperan dalam mengurangi ketidakpastian keuangan yang mungkin dihadapi oleh UMKM di kecamatan Buleleng. Dengan adanya bantuan tunai langsung, UMKM memiliki jaminan tambahan dalam menjaga likuiditas dan kelangsungan operasional mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko kegagalan bisnis dan memungkinkan fokus lebih besar pada pertumbuhan.

Teori *stakeholder* menyatakan pemerintah memiliki suatu kekuatan yang dipertimbangkan UMKM dalam mengelola usaha secara optimal agar tercapai kinerja yang maksimal. Kebijakan pemerintah sering kali dapat dihubungkan dengan teori *stakeholder* karena pemerintah bertindak sebagai pemangku kepentingan utama dalam mengatur dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Pemerintah sering kali menerapkan kebijakan regulasi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk konsumen, lingkungan, dan pekerja. Contohnya adalah kebijakan perlindungan konsumen, regulasi lingkungan, dan standar keselamatan kerja. Pemerintah dapat menerapkan pendekatan partisipatif dalam pembuatan kebijakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti bisnis, masyarakat sipil, dan akademisi. Hal ini memastikan bahwa kepentingan berbagai pihak dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* dimana kebijakan pemerintah ini akan dimaksimalkan oleh UMKM agar dapat mendorong pertumbuhan UMKM.

Hasil penelitian serupa diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh (Syahbana & Novita, 2018) yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM berupa kinerja. Pemerintah memiliki peran strategi dalam menopang dan mendorong pertumbuhan UMKM.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Akses keuangan (X1) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM (Y), hal ini berarti bahwa akses dalam keuangan dapat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Hal ini dikarenakan akses keuangan mempermudah UMKM untuk mengakses keuangan dan pemodalannya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan akses sumber-sumber pemodalannya lainnya.
2. Modal keuangan (X2) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM (Y), penurunan modal keuangan dapat memberikan penurunan pertumbuhan pada UMKM di kecamatan Buleleng. Hal ini dikarenakan dengan adanya modal yang cukup, UMKM dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan produk, ekspansi pasar, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Modal keuangan memungkinkan UMKM untuk menunjukkan keberhasilan dan potensi pertumbuhannya kepada dunia luar.
3. Kebijakan pemerintah (X3) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM (Y), hal ini berarti bahwa kebijakan pemerintah yang baik akan memberikan implikasi yang positif terhadap pertumbuhan UMKM. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah mampu memberikan tambahan modal dengan pemberian bantuan kepada beberapa pelaku UMKM. Bantuan tunai langsung dari pemerintah dapat memberikan sumber daya tambahan kepada pelaku UMKM di kecamatan Buleleng.

Saran

Bagi Dinas Koperasi dan UMKM

Untuk meningkatkan akses keuangan pemerintah harus bekerja sama aktif dengan lembaga keuangan setempat untuk memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan seperti kredit, tabungan, dan asuransi. Selain itu, pemerintah memberikan pelatihan dan konsultasi kepada pelaku UMKM tentang pengelolaan utang, alokasi dana, dan perencanaan keuangan yang baik. Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, seperti bantuan tunai langsung atau insentif pajak, diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran dan juga memberikan informasi dan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan tersebut.

Bagi Pelaku UMKM

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kecamatan Buleleng dapat mengambil langkah-langkah berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan usaha mereka. Pengelolaan modal yang bijaksana juga menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan usaha UMKM. Pelaku UMKM harus melakukan perencanaan keuangan yang cermat, memprioritaskan pengeluaran dan investasi yang paling penting, serta melakukan analisis biaya dan manfaat secara berkala. Selain itu, penting bagi pelaku UMKM untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak pada usaha mereka.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya bisa memperluas cakupan dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan mencakup UMKM dari berbagai sektor ekonomi. Ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pengendalian biaya memengaruhi kinerja keuangan UMKM. Dalam penelitian ini masih ada beberapa variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini sebanyak 22%, sehingga, Peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel lainnya seperti perilaku keuangan, tingkat pendidikan,

adopsi teknologi, *e-commerce*, dan lainnya. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM dan memungkinkan untuk pembentukan kebijakan yang lebih efektif dan strategi pengembangan usaha yang lebih baik di masa depan.

Daftar Pustaka

- Adriani, D., & Wiksuana, I. G. B. (2018). *Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali* [Doctoral dissertation]. Udayana University.
- Aini, A. S. (2022). *Pengaruh Financial Capital, Literasi Keuangan dan IT Utilization Terhadap Kinerja UKM Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Demak (Studi Pada UKM Kabupaten Demak Tahun 2019)* [Doctoral Dissertation]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Anjelia, V. P. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan Dan Modal Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Jawa Tengah (Pada UMKM Di Kabupaten Grobogan)* [Doctoral Dissertation]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aristanto, E., & Malang, U. M. (2019). Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. *Journal of Banking and Finance*, 1(1), 10-23.
- Arta, K. B. D., & Dewi, L. G. K. (2021). Membantu Meningkatkan Penjualan Produk UMKM Masyarakat di Masa Pandemi Melalui Bisnis Online. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 61-65.
- Aqida, M. S., & Fitria, S. (2019). *Pengaruh akses keuangan terhadap pertumbuhan UMKM dengan moderasi literasi keuangan di kota Semarang* [Doctoral Dissertation]. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Bank Indonesia. Booklet Keuangan Inklusif. <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/contents/Buku%20saku%20Keuangan%Inklusif.pdf> Diakses 1 Mei 2024
- Daud, A. U., Niswatin, N., & Taruh, V. (2023). Pengaruh Literasi, Inklusi Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Umkm. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 634–646.
- Eniola, A., & Ektebang, H. (2014). SME firms performance in Nigeria: Competitive advantage and its impact. *International Journal of Research Studies in Management*, 3(2), 75–86.
- Fibriyani, V., & Mufidah, E. (2018). Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap kinerja UMKM di kota pasuruan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 3(3), 873–886.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadiyati, E., & Mulyono, S. (2017). Model of MSME's Competitiveness and Performance Excellent Product in Indonesia: an Approach of Government Policy. *International Journal of Business and Social Science*, 8(2), 99–108.
- Indris, S., & Primiana, I. (2015). *Internal And External Environment Analysis On The*

Performance Of Small And Medium Industries (Smes) In Indonesia. 4(4).

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang Reformasi Sektor Keuangan

Iqbal Hidayatulloh, I. (2020). *Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Dan Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Kabupaten Tegal* [Doctoral dissertation]. Universitas Pancasakti Tegal.

Kareja, N., Alfiah, N., & Setiadevi, S. (2022). Tantangan Peningkatan Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4*.

Marbun, D. S. N., & Simanjuntak, M. (2021). Pengaruh Digital Marketing terhadap Peningkatan Kinerja Pemasaran UMKM Pariwisata di Kabupaten Toba Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis, 1*.

Marija, M., Sihwahjoeni, S., & Apriyanto, G. (2021). Pengaruh Modal Keuangan , dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, 7(1)*, 31–38.

Maulatuzulfa, H. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Literasi Keuangan, Modal Keuangan, Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja UMKM. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1)*, 171–179.

Munizu, M. (2010). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 12(1)*, 33–41.

Nirmayasari, N. (2021). *Pengaruh Pendapatan dan Aspek Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi COVID-19 (UMKM di Belopa)* [Doctoral Dissertation]. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Nisa, D. R. (2021). *Implikasi Konservatisme Akuntansi Dan Prinsip Asas Kekeluargaan Serta Asas Gotong Royong Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Wanita Tulus* [Doctoral Dissertation].

Pramestiningrum, D. R., & Iramani, R. (2020). Pengaruh literasi keuangan, Modal Keuangan, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja usaha pada usaha kecil dan menengah di jawa timur. *J. Bus. Bank, 9(2)*, 279–296.

Purwaningsih, R. R., & Haryono, N. A. (2019). Sumber Daya Manusia, Operasional, Pemasaran, Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Surabaya. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(2)*, 390–409.

Putra, M. R. A., Nuzula, N. F., & Mawardi, M. K. (2021). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Dan Akses Keuangan Terhadap Kinerja Usaha. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis, 15(1)*, 84–94.

Shalsabila, S., & Respati, H. R. (2023). *Analisis Implementasi Enterprise Resource Planning dan Pemasaran Digital Terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia*.

Syahbana, M., & Novita. (2018). Implikasi Pengendalian Internal dan Tata Kelola dalam Pencegahan Kecurangan pada Perangkat Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*.